

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI SAMBOANG DI  
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

**A. MUH. NURFARA AIDID**

Nomor Stambuk : 105640174213



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI SAMBOANG DI  
KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

A.MUH.NURFARA AIDID

Nomor Stambuk : 105640174213

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Pengelolaan Objek wisata pantai samboang di  
kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba  
Nama Mahasiswa : A. Muh. Nurfara Aidid  
Nomor Stambuk : 105640174213  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

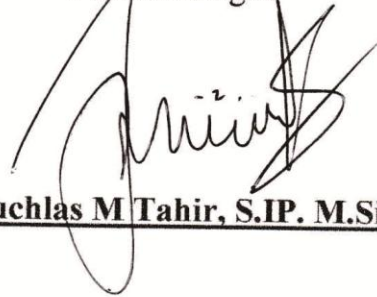
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Muchlas M Tahir, S.IP. M.Si

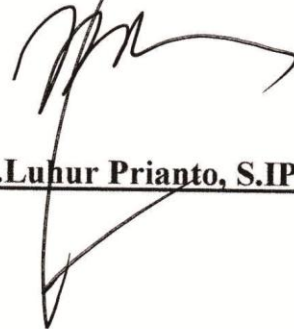
Mengetahui :

Dekan  
Fisipll Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0068/FSP/A.1-VIII/1/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari sabtu, Tanggal 20 Januari 2018

## TIM PENILAI

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Hj, Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

**Penguji**

1. **Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si ( Ketua)**



2. **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd**



3. **Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si**



4. **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si**



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Muh. Nurfara Aidid

Nomor Stambuk : 105640174213

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melaksanakan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelaraka demik.

Makassar, 10 Meil 2017

Yang Menyatakan,

A. Muh. Nurfara Aidid

## ABSTRAK

**A. MUH. NURFARA AIDID, 2017. Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba** dibimbing oleh Samsir Rahim dan Muchlas. M. Tahir).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana cara pengelolaan Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan kendala-kendala yang mempengaruhi pengelolaan di pantai samboang kabupaten bulukumba

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah sudah direncanakan dari dulu dan telah diterapkan secara bertahap (2) kerjasama telah dilakukan oleh dinas pariwisata dalam memperkenalkan pantai samboang yang diwakili bagian pemasaran pariwisata dengan melakukan berbagai kerjasama dengan pihak-pihak (3) Kendala-kendala yang dihadapi pengelolaan objek wisata pantai samboang yaitu jarak dan infrastruktur yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi objek wisata pantai samboang

**Kata Kunci :** *Pengelolaan, Pemerintah Daerah, objek wisata*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Objek wisata pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba** Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Bapak Dr. H.Samsir Rahim, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muchlas M Tahir, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selainitu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.M.Si. selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.Ip.,M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf FASIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
7. Pihak Kepala Lingkungan desa Ereelu Barat
8. Serta teman-teman yang telah membantu memberikan semangat dalam penulisan skripsi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 30 Oktober 2017

A. Muh. Nurfara Aidid



## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
DaftarTabel .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Konsep.....	8
B. Kerangka Pikir .....	21
C. Fokus Penelitian.....	23
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	28
G. Keabsahan Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Hasil Penelitian Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba .....	44
C. Kendala-KendalaYang Dihadapi Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Nama Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Bagan Kerangka Pikir .....	23
Gambar 4.1	Peta administrative kabupaten Bulukumba .....	32
Gambar 4.2	Struktur organisasi dinas kebudayaan dan dinas pariwisata Kabupaten Bulukumba.....	42

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.	Data Informan .....	27
Tabel 1	Penduduk menurut kecamatan di kabupaten Bulukumba tahun 2010 – 2014.....	35
Tabel 2	Penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin Tahun 2010 – 2014.....	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. (Peraturan Pemerintah No.24/1979.). Hal yang sama juga di kemukakan dalam Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM 98/PW:102/MPPT-87. Bahwa Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Dalam hal menunjang pengembangan sektor pariwisata harus disertai dengan perencanaan dan pengelolaan yang matang dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat. sebagaimana yang di nyatakan dalam Undang-Undang No.10/2009 Tentang Kepariwisataan dalam sebuah Pengelolaan Pariwisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya atau pun karena jumlahnya yang terbatas di dunia ini.

Sesuai dengan keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dengan Bupati Bulukumba dalam Peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Rencana Induk

Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) tentang rencana pengembangan kawasan wisata bahwa setiap objek wisata yang memiliki daya tarik di kelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Pantai Samboang yang berpasir putih sangat menarik untuk dikelola secara maksimal baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan beberapa fasilitas sebagai objek wisata alternatif.

Pariwisata menjadi sektor andalan Indonesia yang menjanjikan dalam pemasukan devisa negara. Selain letak Indonesia yang strategis, hal ini juga dikarenakan Indonesia sedang tahap pembangunan dalam segala macam asset potensi wisata. Peranan tersebutlah yang akan memberikan dampak pada berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, maupun kebudayaan. Hal ini sangat berpengaruh dalam pengembangan pariwisata karena saling terkait menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Dalam konteks pengembangan pariwisata, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki paling banyak pusaka budaya, baik yang berasal dari masa prasejarah, Hindu Budha, Islam, dan masa colonial yang tersebar di seluruh nusantara (Ardika, 2015)

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan penelitian, inventarisasi, dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.

Pengelolaan kepariwisataan tidak akan lepas dari unsur fisik dan non fisik. Unsur-unsur fisik dan non fisik tersebut akan menjadi pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan daya dukung dan objek dan pertimbangan dampak-dampak yang di timbulkan dari pengelolaan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus di dasarkan pada perencanaan, pengembangan, dan arah pengelolaan. Pengembangan pariwisata secara sistematis dan arah pengelolaan itu sendiri sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Sebagaimana tercermin dalam pembentukan dan pengakuan terhadap organisasi pariwisata nasional.

Menurut Siagian, (2010) bahwa Pengelolaan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai tepat target yang telah ditentukan.

Objek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang di bangun dan di kembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan di usahakan sebagai tempat yang di kunjungi oleh wisatawan. Objek wisata dapat berupa unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan di manfaatkan sebagai daya tarik untuk menjadi sarana wisata atau ojek wisata.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata, diantaranya merumuskan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata dan berperan sebagai alat pengawasan kegiatan pariwisata sehingga dapat memaksimalkan daerah pengelolaan tujuan pariwisata. Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup handal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Kabupaten Bulukumba memiliki potensi di sektor pariwisata. Kabupaten Bulukumba memiliki berbagai objek pariwisata unggulan yang bisa sangat membantu masyarakat untuk melepaskan penat. Objek wisata tersebut sangat menarik untuk dikunjungi. Tak heran memang jika pemerintah kabupaten setempat sangat menaruh perhatian terhadap pariwisata.. Pengelolaan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya. Lokasi salah satu lokasi objek wisata yang dimaksud yaitu berada di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba khususnya di Pantai samboang.

Objek wisata pantai samboang terletak di Desa Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, 25 km dari Tanjung Bira atau 42 km dari ibukota Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Area ini dapat dijangkau oleh para pengunjungnya sekitar sekitar 6 jam dari arah kota Makassar

dengan jarak 195 km dengan menggunakan transportasi darat berupa motor dan mobil. Apabila calon pengunjung yang berasal dari arah Makassar, Anda akan melewati empat Kabupaten, yakni Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto dan kabupaten Bantaeng.

Pantai berpanorama cukup menarik ini tentunya menjadi daya tarik untuk wisatawan yang ingin merasakan sensasi baru berlibur bersama keluarga. Karena di pantai ini memiliki pemandangan yang indah serta para wisatawan dapat menyalurkan hobbinya seperti berenang, snorkling, memancing, bananaboth dan sebagainya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini infrastruktur seperti jalanan ke lokasi tersebut kurang memadai lagi, serta fasilitas yang disediakan untuk pengunjung juga sudah tidak terawat. Padahal keindahan pantai samboang tidak kalah menariknya dari pantai tanjung Bira. Disinilah terjadi beberapa perbedaan sistem pengelolaan pantai Samboang dengan pengelolaan pantai tanjung Bira. Seharusnya perencanaan tentang pengelolaan pantai samboang harus lebih baik lagi atau bahkan sama dengan sistem pengelolaan yang ada di pantai bira sehingga keindahan pantai samboang dapat dinikmati oleh wisatawan yang datang berkunjung. Apabila pengelolaan sudah tertata dengan rapi maka minat pengunjung atau wisatawan dapat meningkat sehingga dapat menambah pendapatan daerah dalam sektor wisata pantai. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata dapat mengambil langkah yang strategis dari pilihan yang ada. Strategi menjadi sangat penting bagi pengembangan sebuah wisata dalam rangka pencapaian tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa dalam strategi pengelolaan berdasarkan



dimensi-dimensi strategi yang digunakan yaitu tujuan, kebijakan dan program (Kompasiana 2017)

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain : Pengelolaan harus transparan dan tersedia mekanisme pengaduan untuk komplain kepada pengguna layanan, kegiatan publikasi kegiatan pada media massa telah dilakukan namun belum optimal pada lembaga non pemerintah. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam pertanggung jawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk menjamin transparansi internal dan eksternal Dinas Kesehatan Makassar telah membangun website sebagai media sosialisasi dan diseminasi pertanggung jawaban keuangan (Fahril, 2014)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Cahyo, (2016) bahwa dalam konteks inovasi yang lebih luas, pemimpin-pemimpin desa juga dituntut untuk mengembangkan modal social dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang ada. Sebab, pembangunan desa yang dilakukan berbasis pengelolaan sumber daya desa maka, pembangunan yang diupayakan adalah pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan, karakteristik, dan inisiatif mandiri desa.

Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pengelolaan objek wisata Pantai Samboang, Maka dalam penelitian ini penulis akan memilih judul tentang *“Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?
2. Kendala-Kendala yang Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba
2. Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang sehingga dengan penelitian ini dapat berguna dan sebagai masukan bagi penulis yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang Pengelolaan Objek Wisata.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Objek Wisata.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Konsep

##### 1. Konsep Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *menegiare* yaitu yang artinya menangani alat-alat, berasal dari bahasa latin *manus* yang artinya tangan. Dalam bahasa Prancis terdapat kata *mesnagement* yang kemudian menjadi *management*.

Menurut Siagian (dalam Herman, 2015:139), memberikan pengertian pengelolaan sebagai ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. pengelolaan berhubungan erat dengan manajemen. Pengelolaan disini mengandung pengertian tentang adanya suatu proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan dengan menggunakan atau memakai orang lain, baik yang berasal dari organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi.

Menurut Hamiseno (dalam Darmawati 2012:100) Pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Poerwadarminta (dalam Herman, 2015:139) mengemukakan pengertian pengelolaan yakni kelola atau mengelola adalah urusan perusahaan pemerintah dan sebagainya, melakukan suatu pekerjaan,

menyelenggarakan pekerjaan. sedangkan pengelolaan adalah mengurus atau menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu.

Menurut Presenta, (2015) Tata kelola ditunjukkan untuk peningkatan kinerja dan citra (*internal*). Tata kelola selanjutnya dapat meningkatkan nilai ketertarikan (*attractiveness*), persaingan (*competitiveness*), keberlanjutan (*sustainability*) dan lokalitas (*localness*). Tata kelola dimaksudkan sebagai proses orkestrasi pelaku/subjek (manusia), yang melibatkan berbagai sistem, komponen subsistem secara mikro, meso, dan makro, serta proses dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi atau kelembagaan meningkatkan kinerja dalam tatanan ekosistem pariwisata

Model pengelolaan destinasi ke depan memerlukan eksplorasi tatanan nilai, lokalitas, keseimbangan, *championship*, *leadership* dan akuntabilitas agar menciptakan keunggulan destinasi yang berkualitas (*destination excellence*) sekaligus menjadi pilihan dan preferensi wisatawan sebagai destinasi pariwisata masa depan (*destination of the future*). penggalan nilai lokal diadopsi dalam pembangunan kepariwisataan perlu memperoleh perhatian yang seksama untuk meningkatkan kualitas keunikan, kekhasan, lokalitas dan keutuhan yang menjadi ciri pengembangan destinasi pariwisata agar memiliki *point of difference* dalam kepariwisataan. mencermati *stock of knowledge* yang dimiliki bangsa ini sebagai aset dan potensi untuk dikembangkan dengan pendekatan nilai tambah dalam konteks *economy of experience* berbasis nilai etika, estetika, dan ekonomi. (Drs. I Gede Ardika Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2001-2004)..

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2014:1) mengemukakan bahwa dalam proses manajemen terlihat fungsi fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2014:21) mengemukakan bahwa pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Moekijat bahwa pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya Soekanto (dalam Adisasmita, 2014:22) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Richard, (2002: 8) manajemen merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Menurut Handoko, (2000:10) mengemukakan bahwa bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh

seorang manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Menurut Drucker (dalam Amins, 2013:32) bahwa pengelolaan organisasi dengan manajemen selalu dikaitkan dengan cara atau metode sistematis melalui proses merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*) berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi. tujuan akhir yang ingin dicapai dengan proses manajemen ini adalah pencapaian atau pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian, (2010:12) bahwa Pengelolaan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai tepat target yang telah ditentukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi rangkaian-rangkaian yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seerti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi pengelolaan menurut Siagian ( 2010:12) , menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan , meliputi:

1. Perencanaan

2. Pengorganisasiaan
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan

Perencanaan adalah tindakan penentuan pilihan mengenai tujuan nyata yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Perencanaan tersebut titik tolak dalam mencapai tujuan organisasi. Karena perencanaan merupakan alat yang efisien, sehingga kegiatan untuk mencapai tujuan oerorganisasi dapat menghindari pemborosan. Perencanaan akan memuat perkiraan dan prospek perkembangan yang dapat membatasi ketidakpastian pada masa yang akan datang.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses membentuk kerja sama antara dua individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan. melalui struktur organisasi diatur berbagai hubungan antar individu sehingga kerja sama yang diinginkan dapat terjalin dengan baik.

Pelaksanaan adalah tindakan yang membuat sumber daya dapat bergerak untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan akan selalu menghendaki kemampuan dalam mengerahkan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumberdaya manusia agar setiap aktivitasnya mengarah kepada sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan merupakan usaha agar pencapaian tujuan organisasi tepat rencana yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pengawasan secara operasional harus mengukur yang hendak dicapai, menilai pelaksanaan kerja secara

operasional, mengadakan tindakan perbaikan, serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan.

Selain itu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan, berhasil tidaknya proses implementasi di pengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi. serta melakukan evaluasi guna menilai peristiwa atau kegiatan yang sedang di amati, dengan kegiatan tersebut di dasarkan pada data atau fakta serta berpedoman pada kriteria dan tolak ukur dan penilaian tertentu yang telah di tetapkan.

Dalam hal menunjang pengembangan sektor pariwisata harus disertai dengan perencanaan pengelolaan yang matang dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat. sebagaimana yang di nyatakan dalam Undang-Undang No.10/2009 Tentang Kepariwisataaan dalam sebuah pengelolaan pariwisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya atau pun karena jumlahnya yang terbatas di dunia ini.

## **2. Konsep Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Menurut Soetrisno, (dalam Affandi, 2015:109) Bahwa Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Menurut Wahab ( Faisah, 2015:176) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. selanjutnya, Menurut Ismanto (dalam Faisah, 2015:177) *good governance* secara istilah merujuk pada kultur dan struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan didalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Menurut Pranadajaj, (2015:24) Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah. Menurut Strong, (dalam Harnida, 2012:129) mengemukakan pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Apter (dalam Syafiie, 2013:11) bahwa Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Soemendar, (dalam Syafiie, 2013:11) mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Finer, (dalam Harnida 2012:130) pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*procces*), wilayah negara tempat kegiatan (*state*),

pejabat yang memerintah (*the duty*), cara, metode, dan sistem (*manner, method and sistem*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bulukumba dan Bupati Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah (RIPPDA) Kabupaten Bulukumba. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud bahwa RIPPDA adalah suatu rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah yang memuat rencana pengembangan secara rinci mengenai aset, peluang, kawasan, dan prioritas serta objek daya tarik wisata yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa keterkaitannya dengan segala aspek dan faktor pengembangan wilayah dan kota.

Tujuan RIPPDA meliputi:

- a. mendapatkan arahan perencanaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan yang dijabarkan dalam skala 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas pendukung/penunjang;
- b. menciptakan pola tata ruang pariwisata yang serasi dan seimbang dengan melengkapi penyebaran sarana dan prasarana secara merata dan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wisatawan tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan panorama alam;
- c. sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam, adat-istiadat/kebiasaan penduduk, benda cagar budaya dan seni budaya yang layak untuk dijadikan objek wisata;

- d. mengantisipasi secara dini apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sektor kepariwisataan;
- e. memberikan rumusan prioritas pengembangan pariwisata secara berkala menurut urutan skala prioritas dengan memperhatikan tingkatan budaya, sejarah, ekonomi dari daerah tujuan wisata.

Sasaran RIPPDA meliputi:

- a. peningkatan kerjasama regional, nasional, maupun internasional untuk mengupayakan pariwisata terintegrasi dalam keseluruhan perencanaan dan manajemen lingkungan dalam menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan terkait seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam hubungannya dengan pariwisata;
- b. tindakan rehabilitasi terhadap daerah yang telah terdegradasi sebagai pencerminan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- c. berupaya mendorong aktifitas dan penggunaan benda-benda yang dibutuhkan dari karakter lingkungan dan berupaya untuk memperkuat daya tarik, identitas komunitas, dan pengembangan tempat-tempat bersejarah;
- d. pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dilengkapi dan diarahkan oleh kebijaksanaan pemerintah ditingkat nasional, regional dan lokal tempat pembangunan tersebut dilaksanakan;
- e. mendorong kemitraan antara jaringan pelaku/praktisi pariwisata, dan melibatkan pengkajian ilmiah serta konsultasi publik dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata;

- f. menetapkan pendidikan dan program-program latihan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas bisnis kepariwisataan.

Menurut Antariksa, (2016: 35-36) ada berbagai alasan pemerintah untuk membangun kepariwisataan di dalam suatu negara :

1. Berbagai motifasi tersebut dapat menjadi peluang bagi negara untuk membangun perekonomiannya untuk menjadi suatu pola kebijakan yang terintegrasi.
2. Peluang tersebut mendorong pengertian terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan disekitar destinasi pariwisata, meningkatkan nilai cita suatu wilayah geografis yang telah kehilangan daya tariknya,.
3. Bagi negara berkembang, industri pariwisata dapat dikatakan merupakan media pembangunan ekonomi yang tidak memerlukan investasi yang terlalu besar dalam jangka panjang sebelum dapat memberikan keuntungan.
4. Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana pendukung . jika hal tersebut bergantung pada teknologi negara lain, maka devisa untuk pembangunan akan tersedot keluar negeri karena keharusan untuk mengimpor barang modal dan barang habis pakai (*leakage* atau kebocoran devisa).
5. Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi pada perekonomian dunia.
6. Berkaitan langsung dengan upaya penuntasan kemiskinan sektor pariwisata di anggap memiliki peran yang sangat penting.

Kepariwisataan merupakan aktifitas yang luar biasa kompleks, termasuk dalam hal kebijakan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilannya. Kegiatan kepariwisataan pada prinsipnya bukanlah suatu aktifitas pembangunan dasar yang bersifat fisik, melainkan suatu kegiatan gabungan yang membutuhkan kordinasi tingkat tinggi antar pembuat kebijakan. Oleh karena itu sangat diharapkan kemampuan untuk meyakinkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal yang dapat mendukung pelaksanaannya. Antariksa, (2016: 48).

### **3. Konsep Objek wisata**

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata. Dalam undang-undang di atas, yang termasuk obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

1. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka.
2. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.

3. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat- tempat ziarah, dan lain-lain.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata meliputi Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

*World Tourism Organization* (WTO), Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya..

Definisi pariwisata terdapat pada Undang-Undang No.10/ 2009 tentang Kepariwisataan, pada Bab I pasal I mengenai ketentuan umum. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut SK Menparpostel No. KM 98 PW. 102 MPPT –87 yaitu : “Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan”.

Menurut Abdurachman (dalam Darmawati, 2012:101), bahwa objek wisata adalah segala obyek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Beberapa hal yang berhubungan dengan objek wisata diantaranya. Yoeti (dalam Darmawati, 2012:101) diartikan sebagai seseorang tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa, dan agama yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain dari pada negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, didalam jangka waktu 12 bulan berturut turut, untuk tujuan nonimigran yang legal

Menurut Spilane (dalam Soebagyo, 2012:154) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Menurut Joyosuharto (dalam Soebagyo, 2012:155) pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi; (2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup; (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

## **B. Kerangka Fikir**

Dalam hal menunjang pengembangan sektor pariwisata harus disertai dengan perencanaan pengelolaan yang matang dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat. sebagaimana yang di nyatakan dalam Undang-Undang No.10/2009 Tentang Kepariwisataan dalam sebuah pengelolaan pariwisata perlu



direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya atau pun karena jumlahnya yang terbatas di dunia ini.

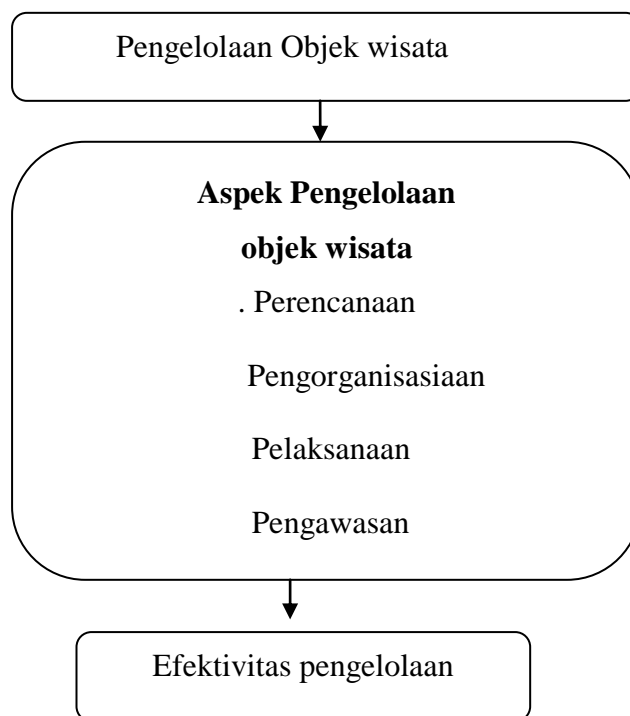
Menurut Siagian, (2010:12) bahwa Pengelolaan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai tepat target yang telah ditentukan..

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi rangkaian-rangkaian yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun fungsi pengelolaan menurut Siagian ( 2010:12) , menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan , meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan

### Bagan Kerangka Pikir



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Objek Wisata di Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

## **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan yaitu sesuatu yang direncanakan secara terperinci dan disusun secara sistematis agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini pengelolaan pantai samboang di lakukan oleh pemerintah daerah yang dimana dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bulukumba memiliki peranan penting dalam melakukan hal ini

### 2. Objek Wisata

Segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat dikelola baik wisata bahari, wisata alam dan sebagainya yang dapat memberikan keuntungan atau pemasukan bagi daerah. Khususnya di pantai samboang yang memiliki panorama alam yang menarik dan tak kalah dengan keindahan pantai lain yang ada di kabupaten bulukumba

### 3. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan pengelolaan pantai samboang. Dalam hal ini dinas pariwisata dan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan bekerja sama dengan baik agar terwujud objek wisata bahari yang ada di kecamatan bontotiro.

### 4. Pengorganisasian(*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses membentuk kerja sama antara dua individu atau lebih agar dapat tercapai tujuan pengelolaan secara bersama-sama. Dinas pariwisata dalam hal ini yang bertanggungjawab yaitu badan pemasaran memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mengenalkan

objek wisata pantai samboang kepada publik. Tak hanya di kabupaten bulukumba, keindahan pantai samboang di harapkan terkenal di luar kabupaten bulukumba sehingga banyak wisatawan yang tertarik datang untuk mengunjunginya.

#### 5. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan yang membuat sumber daya dapat bergerak untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan akan selalu menghendaki kemampuan dalam mengerahkan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumberdaya manusia agar setiap aktivitasnya mengarah kepada sasaran yang hendak dicapai.

#### 6. Pengawasan

Pengawasan merupakan usaha agar pencapaian tujuan organisasi tepat rencana yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pengawasan secara operasional harus mengukur yang hendak dicapai, menilai pelaksanaan kerja secara operasional, mengadakan tindakan perbaikan, serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan.

#### 7. Efektivitas

Efektifitas yaitu seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di harapkan dapat terlaksana dengan sesuai rencana dan tercapai tujuan yang diinginkan sehingga pantai samboang dapat menjadi wisata bahari terkenal di kabupaten bulukumba.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Rencana awal penelitian berlangsung kurang lebih 2 bulan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba khususnya di Pantai Samboang. penelitian dimulai pada tanggal 26 september sampai dengan 25 November 2017. Namun untuk pengambilan informasi dan data akuratnya dilaksanakan di dinas pariwisata.

#### **B. Tipe dan Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan (Sugiyono, 2013) Tujuan digunakannya penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah fenomenologi. Maksud dari fenomenologi itu sendiri adalah dalam penelitian ini akan digambarkan dan dijelaskan masalah-masalah dalam proses Pengelolaan Objek Wisata. Selain masalah yang ditemukan oleh peneliti sendiri tentunya masalah yang dialami oleh informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa yang diketahui dan dialami oleh informan.

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses Pengelolaan Objek Wisata. Data primer juga dimaksudkan untuk pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

## D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan jumlah informan dalam penelitian.

No	Informan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pariwisata	1 Orang
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata	1 Orang
3.	Kepala Badan Pemasaran Pariwisata	1 Orang
4.	Kepala lingkungan desa ereelu barat	1 Orang
5.	Masyarakat	5 Orang

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk memperoleh data mengenai Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

#### **2. Wawancara**

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Desa beserta Masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang..

### **F. Teknik Analisis data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana datayang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Sugiyono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu:

#### **1. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sukri (Sugiyono, 2013), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan



dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

## 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba**

###### **a. Kondisi geografis**

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,67 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa. Kabupaten Bulukumba memiliki 10 Kecamatan, 27 Kelurahan, serta 109 Desa. Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan. Ke-10 kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang
4. Kecamatan Rilau Ale
5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang,

Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

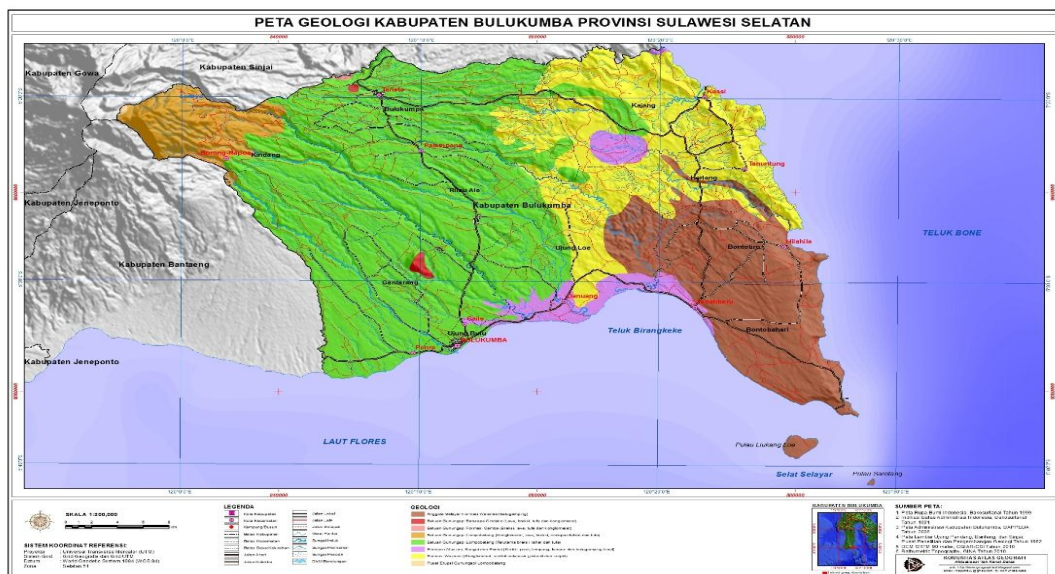
b. Batas Administratif

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara  $5^{\circ}20''$  sampai  $5^{\circ}40''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}50''$  sampai  $120^{\circ}28''$  Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar
- Sebelah Timur: Teluk Bone
- Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

Gambar 4.1 Peta administratif kabupaten Bulukumba



c. Topografi

Bulukumba terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter diatas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu : Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendah engan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan,

yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulo, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.
- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

#### d. Keadaan Penduduk

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk mencapai 435.035 jiwa, yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan kepadatan

penduduk 376,76 orang per Km<sup>2</sup> dan ini berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013 dengan kepadatan penduduk 375,75 orang per Km<sup>2</sup>, selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 1 Penduduk menurut kecamatan di kabupaten Bulukumba tahun 2010 – 2014

No	Kecamatan	2010(jiwa)	2011(jiwa)	2012(jiwa)	2012(jiwa)	2010(jiwa)
1	Gantarang	71.158	71.741	72.183	77.276	78.468
2	Ujung Bulu	48.126	48.518	48.818	50.560	49.807
3	Ujung Loe	39.533	39.859	40.105	36.812	45.089
4	Bontobahari	23.976	24.180	24.329	28.294	28.173
5	Bontotiro	22.808	23.004	23.146	27.715	29.724
6	Herlang	24.128	24.332	24.482	31.531	29.724
7	Kajang	47.080	47.467	47.760	53.391	46.880
8	Bulukumpa	50.835	51.252	51.568	53.836	53.415
9	Rilau Ale	37.809	38.121	38.357	42.491	42.539
10	Kindang	29.815	30.057	30.242	31.967	31.850
Bulukumba		395.268	398.531	400.990	433.873	435.035

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2014 perbandingan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki, yakni 217.520 jiwa perempuan dibandingkan penduduk

laki-laki yakni 217.515 jiwa. Rasio jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yakni 100, berarti dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 100 orang.

Tabel 2 Penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin Tahun 2010 - 2014

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1	GANTARANG	39.648	38.820	78.468	102,13
2	UJUNGBULU	24.975	24.832	49.807	100,58
3	UJUNG LOE	22.472	22.617	45.089	99,36
4	BONTOBAHARI	14.003	14.170	28.173	98,82
5	BONTOTIRO	14.347	14.743	29.090	97,31
6	HERLANG	14.718	15.006	29.724	98,08
7	KAJANG	23.628	23.252	46.880	101,62
8	BULUKUMPA	26.521	26.894	53.415	98,61
9	RILAU ALE	21.054	21.485	42.539	97,99
10	KINDANG	16.149	15.701	31.850	102,85
BLK	2014	217.515	217.520	435.035	100,00
	2013	209.036	224.837	433.873	92
	2012	188.597	212.393	400.990	89
	2011	187.439	211.092	398.531	89
	2010	186.890	208.378	395.268	90

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014.

## 1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN BONTOTIRO

Bontotiro adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bontotiro berasal dari kata Bonto (daratan) dan Tiro (melihat), yang berarti daratan di mana kita dapat melihat daerah sekitar. Hal ini dikarenakan kawasan Bontotiro memang berada sedikit lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Suku yang mendiami daerah ini adalah Suku Konjo. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Konjo yang memiliki kemiripan dengan Bahasa Makassar maupun Bahasa Bugis

Pantai Samboang terletak di Desa Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro. Panorama yang indah dan lekukan bibir pantai yang landai, serta terumbu karang yang tak jauh dari pantai, menjadikan Samboang berbeda dengan objek wisata pantai lainnya. Di tempat ini pula terdapat pulau kecil yang telah dihubungkan dengan titian sepanjang 20 meter. Bagi wisatawan yang gemar memancing di tempat inilah dapat menyalurkan hobby.

Kecamatan Bontotiro sekarang terdiri atas 12 kelurahan/desa, yaitu;

1. Kelurahan/Desa Batang
2. Kelurahan/Desa Bonto Barua
3. Kelurahan/Desa Bonto Bulaeng
4. Kelurahan/Desa Bonto Marannu
5. Kelurahan/Desa Bonto Tangnga
6. Kelurahan/Desa Buhung Bundang
7. Kelurahan/Desa Caramming
8. Kelurahan/Desa Dwi Tiro



9. Kelurahan/DesaEkatiro
10. Kelurahan/DesaPakubalaho
11. Kelurahan/DesaTamalanrea
12. Kelurahan/Desa Tritiro

#### Letak Geografis Kecamatan Bontotiro

- Utara : Kecamatan Herlang
- Selatan : Kecamatan Bontobahari
- Barat : Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Ujungloe
- Timur : Teluk Bone

### **1.3 GAMBARAN UMUM PANTAI SAMBOANG**

#### a. Selayar Pandang

Bulukumba atau Panrita Lopi sangat dikenal dengan keindahan alamnya yang berupa pantai yang cantik. Salah satu pantai yang terdapat di Kabupaten Bulukumba yaitu Pantai Samboang, dimana Pantai ini memberikan pengunjung dengan panorama pasir putih yang sangat mengagumkan dan juga pemandangan pohon kelapa yang berjejer dipinggir pantai. Ketika mengunjungi pantai ini wisatawan bisa merasakan kesegaran alam di pantai samboang karena disamping kiri dan kanan pantai terdapat jajaran gugusan tebing yang ditumbuhi berbagai macam pohon hijau yang menyehatkan dan menyegarkan mata.

Selain itu di pantai samboang juga terdapat pulau kecil yang berada kurang lebih 20 meter dari pulau samboang. Dan pulau ini sangat cocok untuk dijadikan spot memancing dan fasilitas untuk menuju ke pulau kecil ini pun sudah tersedia.

#### b. Keistimewaan

Pantai samboang memiliki keindahan pasir putih yang tidak kalah dengan keindahan pasir putih pantai Bira. Pantai ini memberikan keindahan kepada wisatawan dengan pemandangan pohon-pohon hijau yang berjejer dipinggir pantai. Keindahan pantai samboang bukan hanya pada pemandangan pasir putih, tetapi wisatawan bisa merasakan sensasi pemandangan alam yang bersatu dalam satu view yaitu pemandangan pantai pasir putih diselingi sunrise/sunset dan hijaunya hutan di pantai berpadu menjadi satu pemandangan yang indah.

Pemandangan lain yang bisa wisatawan saksikan di Pantai Samboang yaitu pemandangan bawah lautnya. Pantai ini sangat indah, sama dengan pantai-pantai lainnya yang kaya dengan keindahan baharinya karena pantai ini mempunyai banyak spesies bawah laut yang membuat pengunjung/wisatawan terkagum.

#### c. Lokasi

Objek wisata Pantai samboang terletak di Desa Eka Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

#### d. Akses

Cara menuju Pantai Samboang bisa menggunakan kendaraan pribadi, rental kendaraan maupun menggunakan angkutan umum. Jika berangkat dari Kota Bulukumba, Wisatawan akan menempuh jarak sekitar 45 Kilometer, dan jika berangkat dari Pusat Kota Makassar akan menempuh jarak sekitar 215 Kilometer

e. Harga Tiket

Harga tiket masuk ke Pantai samboang untuk dewasa Rp. 1500 dan untuk anak-anak Rp. 1000. Dan jika wisatawan ingin menginap bisa menyewa penginapan dengan kisaran harga Rp.300.000 sampai Rp.500.000.

f. Akomodasi dan fasilitas

Pihak pengelola Pantai samboang sudah memberikan fasilitas seperti penginapan bagi wisatawan yang ingin menginap serta tempat untuk memancing bagi wisatawan yang memiliki hobi untuk memancing. Akan tetapi semua fasilitas tersebut sudah tidak terawat lagi.

#### **1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA**

Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 yang menyangkut dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dengan lingkup tugas dan kewenangannya

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi: ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
  - e. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya
1. Susunan dan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekertariat
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang kebudayaan dan kesenian
    - 1) Seksi suaka peninggalan sejarah dan purbakala
    - 2) Seksi pengembangan budaya, sejarah dan nilai tradisional
    - 3) Seksi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional, modern dan kontemporer
  - d. Bidang pengembangan kepariwisataan
    - 1) Seksi Sarana
    - 2) Seksi Objek Wisata
  - e. Bidang Pemasaran
    - 1) Seksi Promosi, Penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat
    - 2) Seksi Analisis pasar dan investasi
  - f. Pelaksanaan teknis Dinas

g. Kelompok jabatan fungsional

Bagian struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Gambar 4.2 Struktur organisasi dinas kebudayaan dan dinas pariwisata Kabupaten Bulukumba



2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba

a. Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah :

“ Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui Optimalisasi Potensi Daerah dengan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang dilandasi pada Pemerintahan yang Demokratis dan Religius “

b. Misi

1. Penuntasan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan, kependudukan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan

2. Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui percepatan usaha agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing dan berbasis kerakyatan dengan menjaga keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan.
3. Menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah.
4. Mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat, aman dan bertanggung jawab.
5. Mengoptimalkan potensi sumber daya lokal pada sektor pertanian secara umum, perikanan, kelautan dan pariwisata.
6. Menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa Entrepreneur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif.
8. Mewujudkan tata pemerintahan yang makin baik, bersih, damai, teratur dan amanah (Good Governance) dengan berlandaskan pada kedaulatan rakyat, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
9. Pengembangan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah.
10. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta budaya dan peninggalan situs sejarah.
11. Mendorong terciptanya suasana religius didalam kehidupan bermasyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

12. Membangun pusat kemaritiman selatan selatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. Hasil Penelitian Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba**

Pengelolaan pariwisata di suatu destinasi tidak terlepas dari perencanaan yang terperinci dan kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan suatu objek wisata. Interaksi ini melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah daerah yang d atas namakan dinas pariwisata bersama aparaturn pemerintahan yang lain.

Upaya suatu destinasi untuk memenangkan suatu persaingan dalam menarik wisatawan berkunjung destinasi wisata. Apabila suatu destinasi dapat menarik perhatian wisatawan maka peluang untuk mendapatkan investor-investor untuk terlibat dalam pembangunan objek wisata sangat terbuka.

Oleh karena itu perencanaan dan kerjasama yang berkaitan dengan pariwisata harus berjalan dengan seirama baik antara satu organisasi atau instansi dengan instansi lain. Kegiatan pemasaran juga harus menjadi poin penting karena masyarakat membutuhkan sumber-sumber informasi terbaru mengenai wisata agar mereka mengetahui tentang objek wisata yang baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai pengelolaan agar program ini bisa berjalan sesuai manfaatnya di dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan objek wisata Pantai samboang di Kabupaten Bulukumba. Beberapa aspek dalam

Pengelolaan yang di kemukakan oleh Drucker, 2013 mengenai tahap-tahap dalam pengelolaan yaitu :

1. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan pengelolaan pantai samboang. Disini kedua instansi yang bertanggung jawab terhadap rencana kedepannya harus menyusun secara terperinci kemudian menerapkan di lapangan
2. Pengorganisasian adalah proses membentuk kerja sama antara dua individu atau lebih agar dapat tercapai tujuan pengelolaan secara bersama-sama.
3. Pelaksanaan adalah tindakan yang membuat sumber daya dapat bergerak untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan akan selalu menghendaki kemampuan dalam mengerahkan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumberdaya manusia agar setiap aktivitasnya mengarah kepada sasaran yang hendak dicapai.
4. Pengawasan merupakan usaha agar pencapaian tujuan organisasi tepat rencana yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pengawasan secara operasional harus mengukur yang hendak dicapai, menilai pelaksanaan kerja secara operasional, mengadakan tindakan perbaikan, serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan.
5. Efektifitas yaitu seberapa baik pekerjaan yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.

Berikut ini, deskripsi dari hasil wawancara antara penulis dengan informan yang dikaitkan dengan aspek-aspek dalam Pengelolaan



## 1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis untuk mencapai tujuan pengelolaan pantai samboang. Disini kedua instansi yang bertanggung jawab terhadap rencana kedepannya harus menyusun secara terperinci baik rencana fisik dan non fisik kemudian menerapkan di lapangan Sebagaimana yang telah di tentukan dalam RIPPDA kabupaten bulukumba yang mengatur tentang rencana pengelolaan objek wisata yang memiliki potensi dalam menambah pemasukan daerah maka setiap objek wisata harus di kelola dan direncanakan secara terperinci dan di harapkan akan selesai sesuai dengan harapan.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai bagaimana rencana ata strategi yang sesua dijalankan dan berjalan sesuai manfaatnya di Dinas Kabupaten Bulukumba

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, yang Mengatakan bahwa :

“ Dalam rangka menyusun suatu rencana maka terlebih dahulu meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sesungguhnya apabila kualitas sumber daya manusia baik maka peningkatan mutu dan produk objek wisata dapat semankin kompetitif dan dapat bersaing di domestik dalam memikat minat wisatawan untuk mengunjungi pantai samboang. Selain itu di pantai samboang juga direncanakan dibuat *waterboom* pertama yang ada di kabupaten Bulukumba. Adapun anggaearn yang kami rencanakan untuk menata atau memperbaiki sistem pengelolaan pantai samboang yaitu sekitar kurang lebih 40M”( Hasil Wawancara AS, 05 Oktober 2017)

Pendapat tambahan yang di kemukakan oleh kepala dinas pariwisata kabupaten bulukumba mengenai perencanaan pengelolaan objek wisata pantai samboang yaitu :

“ adapun rencana yang kami akan lakukan pada pantai samboang yaitu dengan membuat lahan parker pada lokasi wisata dan memperbaiki pintu masuk atau pintu loket serta membangun beberapa penginapan untuk wisatawan yang akan datang berkunjung agar wisatawan merasa nyaman dan menjadi nyaman saat datang berkunjung. Dalam hal penganggaran kami telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan dan akan mengajukannya ke DPRD kabupaten bulukumba” ( Hasil Wawancara AS, 05 Oktober 2017)

Hal tersebut senada dinyatakan oleh sekretaris Dinas pariwisata

Kabupaten Bulukumba tersebut menyatakan:

“ Dalam Rangka membuat persaingan dalam sektor pariwisata bahari khususnya di wilayah bontotiro maka dinas pariwisata memiliki rencana untuk membangun sebuah *waterboom* pertama yang ada di kabupaten bulukumba guna meningkatkan minat wisatawan untuk datang berkunjung.” ( Hasil Wawancara AM, 05 Oktober 2017).

Hal tersebut pula dinyatakan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Kabupaten Bulukumba, tersebut menyatakan :

“ Upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan pemasaran Pantai samboang yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan promosi pariwisata daerah antara lain kita melakukan promosi serta membuat perencanaan wisata air pertama di kabubapen Bulukumba yaitu dengan membangun *waterboom* pertama di Kabupaten Bulukumba.” ( Hasil Wawancara A, 05 Oktober 2017).

Berdasarkan Hasil Wawancara dan temuan langsung di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba sudah baik namun perlu di tingkatkan dari segi kualitas mutu sumber daya manusia serta pembangunan wisata air pertama di kabupaten Bulukumba ( *Waterboom*) sudah baik karena ini akan menjadi pertama kali yang ada di kabupaten Bulukumba. Dan pembenahan kembali tempat penginapan bagi wisatawan yang datang berkunjung.

Perencanaan nonfisik seperti anggaran perencanaan sekitar 40M di harapkan pengelolaan akan tercapai sesuai dengan tujuannya dari awal .karena perencanaan yang dibuat harus di terapkan secara berkala sesuai dengan RIPPDA tentang rencana pengembangan kawasan wisata bahwa setiap objek wisata harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kabupaten bulukumba khususnya pada pantai samboang karena pantai ini memiliki pemandangan yang indah dan menarik ,sehingga dapat menjadi sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah kabupaten bulukumba di sektor pariwisata. Sesuai dengan teori pengelolaan yang mencakup masalah perencanaan maka dari itu rencana yang telah dibuat secara terperinci harus di laksanakan sesuai dengan tujuannya sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan karena perencanaan harus diterapkan tidak untuk dibuat saja

Dalam hal menjalankan suatu rencana , aspek-aspek yang di libatkan di dalamnya yaitu dinas dan instansi-instansi serta pihak swasta yang memiliki minat akan wisata bahari khususnya wisata pantai. Sebab pengelolaan pantai samboang membutuhkan beberapa dana tambahan dari pihak-pihak yang peduli, karena di pantai samboang tidak tersedia lahan parkir bagi wisatawan yang datang berkunjung dan tidak terdapat pedagang kaki lima yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang berkunjung di pantai samboang.

Tabel perencanaan anggaran pengelolaan pantai samboang

No	Objek yang akan di benahi	Anggaran
1.	Infrastruktur jalan	Rp.5 miliar
2.	Pengembangan lokasi wisata	Rp. 2 Miliar
3.	Pembuatan waterboom	Rp. 37 Miliar

## 2. Pengorganisasian

Dalam hal ini untuk mengelola objek wisata harus ada kerjasama tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Seperti penentuan bidang tugas pekerjaan, pengelompokan, pembagian, dan penetapan tugas masing-masing. Di dalam suatu pengorganisasian atau membentuk suatu kerjasama dengan berbagai pihak diharapkan terjalin secara seksama sehingga kerjasama yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Agar dalam kerjasama dapat menaikkan pamor suatu objek wisata yang dikelola dan dapat dikenal oleh publik.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai apa kebijakan kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat mencapai suatu keberhasilan pengelolaan objek wisata, jadi untuk mengetahui masalah kerjasama yang dilakukan dinas pariwisata maka peneliti

melakukan beberapa wawancara dengan informan yang terkait dengan pengelolaan objek wisata pantai samboang.

Berkaitan dengan pengorganisasian maka peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba mengatakan Bahwa:

“ Dalam rangka membuat suatu mitra untuk mengenalkan objek wisata pantai samboang maka dari pihak dinas pariwisata diwakili badan pemasaran melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari media elektronik seperti televisi, surat kabar guna untuk mengenalkan pantai samboang ke publik karena pantai samboang tidak kalah indahnya dengan pantai yang berada di bontobahari. Selain dengan melakukan kerjasama dengan media pihak dinas pariwisata juga melakukan kerjasama dengan dinas kebersihan agar menjaga kebersihan pantai samboang” ( Hasil Wawancara AS, 05 Oktober 2017)

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Bulukumba selaku orang yang terlibat langsung dalam pemasaran atau promosi kawasan objek wisata, tersebut mengatakan :

“ Beberapa kebijakan yang kami lakukan untuk memasarkan objek wisata pantai Samboang yaitu dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan promosi pariwisata ataupun kerjasama dengan beberapa media elektronik ataupun cetak. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan serta melakukan pelatihan sumber daya manusia agar kualitas sumber dayanya menjadi baik . dalam hal menambah pembiayaan kami dinas pariwisata melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat mendapatkan dana tambahan dalam mengelola pantai samboang“( Hasil Wawancara A, 05 Oktober 2017).

Pernyataan tersebut di perkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Dina Pariwisata Kabupaten Bulukumba untuk kerjasama pemerintah dengan badan promosi dalam melakukan pemasaran objek wisata yang mengatakan :

“ Kebijakan bersama yang kita lakukan yaitu dengan menjalin berbagai kerjasama antara pihak pemerintah dengan lembaga-lembaga swasta dalam mengenalkan potensi objek wisata yang ada di pantai samboang terutama di tahun kedepan akan dibuat pemandian baru di kawasan tersebut sehingga para masyarakat mengetahui dan dapat meningkatkan

kunjungannya ke pantai samboang” ( Hasil Wawancara AM, 05 Oktober 2017).

Pernyataan tersebut senada dengan wawancara dengan kepala lingkungan desa ereelu barat yang mengatakan bahwa :

“ pemerintah telah melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak serta melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan wisata pantai samboang agar kedepannya dapat menjadi wisata pantai nomor satu yang ada di kecamatan bontotiro” ( Hasil wawancara R, 15 oktober 2017).

Seperti wawancara sebelumnya peneliti melakukan wawancara kepada pengunjung atau masyarakat yang ada di kawasan objek wisata pantai samboang kabupaten bulukumba menyatakan bahwa:

“ Pihak pemerintah telah melakukan berbagai hubungan kerjasama dengan instansi swasta dalam mengenalkan wisata pantai samboang kepada masyarakat dengan melalui media massa ataupun elektronik sehingga kami sebagai pengunjung mengetahui jika ada sebuah wisata bahari yang tak kalah dengan wisata bahari lain yang ada di kabupaten bulukumba “ ( Hasil wawancara S, 15 oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tentang pengorganisasian atau kerjasama yang telah di tetapkan tentunya akan melahirkan kebijakan yaitu suatu kerjasama antara pemerintah daerah, bidang promosi dan dinas kebudayaan dan pariwisata serta peta lokasi pantai samboang yang mana kegunaannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah agar dapat mendatangi serta menikmati pemandangan yang indah yang terdapat di pantai samboang. Selain itu kerjasama dengan media elektronik dan dinas kebersihan diharapkan dapat menunjang pengelolaan objek wisata ini. Berkaitan dengan teori tentang pengelolaan khususnya pengorganisasian dalam

menentukan pembagian kelompok tugas maka semua itu telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal mengorganisir semua sumber daya yang ada maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat mendapatkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan segala hal yang ada pada wisata pantai. Dalam membangun suatu objek wisata diperlukan suatu kerjasama dengan berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah yang berperan langsung melainkan membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak swasta yang memiliki minat di sektor pariwisata

### **3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah tindakan yang membuat sumber daya dapat bergerak untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan akan selalu menghendaki kemampuan dalam mengarahkan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumberdaya manusia agar setiap aktivitasnya mengarah kepada sasaran yang hendak dicapai.

Proses mengarahkan dan mempengaruhi anggota organisasi secara individual maupun keseluruhan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. dalam proses ini manajer atau pemimpin organisasi dapat mendorong karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang terbaik (*do their best*). Dalam hal ini kepala dinas pariwisata memegang peran penting dalam memberikan masukan atau pengarahan kepada bawahannya agar dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam instansi.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap kepala dinas pariwisata kabupaten bulukumba mengenai pelaksanaan terhadap pengelolaan objek wisata pantai samboang, yang mengatakan bahwa:

“ Beberapa kebijakan telah kami lakukan dalam memberikan pengarahan terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pantai samboang dengan cara melakukan pendekatan individu per individu sehingga dapat terjalin kerjasama yang lebih baik dalam menata kembali pantai samboang sehingga tidak tertinggal dari wisata pantai yang lain.pelaksanaan rencana pengelolaan pantai samboang insyaallah dilaksanakan pada awal tahun 2018 dan harus sesuai dengan target yang di harapkan agar dapat di nikmati secepatnya oleh pengunjung atau masyarakat”( Hasil Wawancara AS, 05 Oktober 2017)

Kebijakan dinas pariwisata juga di tambahkan sekretaris dinas pariwisata untuk pelaksanaan pengelolaan terhadap objek wisata pantai samboang kabupaten bulukumba, menyatakan bahwa :

“ Kebijakan bersama telah kami lakukan bersama kepala dinas pariwisata dan badan yang berperan dalam menyawasi dan pelaksanaan rencana sehingga terbentuk kerjasama yang baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam membantu terselenggaranya rencana yang telah disusun secara bersama”( Hasil Wawancara AM, 05 Oktober 2017).

Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Bulukumba dalam hal pengarahan terhadap pengembangan objek wisata pantai samboang, mengatakan :

“ Proses pengarahan telah kami susun secara bersama dengan kepala dinas dan staf yang lain dalam memberikan pengawasan yang evektif di terapkan dilapangan agar tujuan dan hasil yang diinginkan sejalan denran perencanaan pengembangan objek wisata pantai samboang di kabupaten bulukumba.”( Hasil Wawancara A, 05 Oktober 2017).



Seperti wawancara sebelumnya peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada salah satu informan yaitu kepala lingkungan desa ereelu barat yang ada di tempat tersebut, menyatakan :

“ Kita memang selaku warga yang ada di kawasan pantai samboang senantiasa melakukan pengawasan dan pengarahan langsung kepada pengunjung dan petugas yang membersihkan pantai sekitar wilayah tersebut agar pengunjung tidak semena-mena dalam membuang sampahnya dan petugas kebersihan dapat melakukan tugas dan fungsinya yang telah diberikan langsung oleh dinas pariwisata.”(Hasil wawancara, R 15 oktober 2017)

Hasil wawancara juga peneliti lakukan kepada Kepala Lingkungan Desa ereelu Barat dalam proses Pelaksanaan Pengelolaan pantai samboang, mengatakan Bahwa:

“ Kami sebagai wakil dari pemerintah yang ada di daerah memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan proses pengelolaan yang dilakukan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah dibuat dari awal, apabila terjadi penyimpangan maka kami memiliki hak untuk melakukan pelaporan ke dinas pariwisata” ( Hasil wawancara R, 15 oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan informan di lokasi penelitian bahwa pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan adanya pelaksanaan tentunya ada pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak apabila terjadi penyimpangan karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa pelaksanaan setiap kebijakan harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dari awal. Pelaksanaan yang dimaksud dalam pengelolaan pantai samboang yaitu seperti terlaksananya beberapa pembangunan di lokasi wisata seperti beberapa peninapan untuk wisatawan. sesuai dengan

RIPPDA tentang rencana pengembangan kawasan wisata bahwa setiap objek wisata harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kabupaten bulukumba.

Pelaksanaan rencana pembangunan kembali objek wisata pantai samboang telah di lakukan secara bertahap oleh dinas pariwisata di tambah bantuan dari pihak swasta yang memiliki minat terhadap perkembangan pariwisata yang ada di wilayah kabupaten bulukumba. Pelaksanaan ini diharapkan sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati oleh dinas pariwisata dengan pihak swasta agar tidak terjadi suatu penyimpangan didalam pengelolaan objek wisata pantai samboang.

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan merupakan usaha agar pencapaian tujuan organisasi tepat rencana yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pengawasan secara operasional harus mengukur yang hendak dicapai, menilai pelaksanaan kerja secara operasional, mengadakan tindakan perbaikan, serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan. Bagaimana pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi rencana yang sudah di susun secara sistematis agar terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan wawan cara yang dilakukan peneliti kepada informan dimana informan tersebut yaitu kepala dinas pariwisata kabupaten bulukumba tentang pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan pantai samboang , menyatakan bahwa:

“ Kami selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pantai samboang di kabupaten bulukumba memberikan perhatian khusus terhadap proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan pantai samboang

dengan bekerjasama dengan pihak pemerhati lingkungan serta pihak lain agar prosesnya terlaksana sesuai dengan tujuannya. Sehubungan dengan itu dinas pariwisata melakukan pemantauan secara langsung kelokasi dengan mengirim berbagai pihak yang mengerti dengan keadaan di lokasi “( Hasil Wawancara AS, 05 Oktober 2017)

Berdasarkan wawancara dengan kepala dinas pariwisata kabupaten bulukumba bahwa pengendalian atau controlling sangat penting dalam membantu terlaksananya rencana yang telah di susun secara bersama agar tercapai sesuai dengan tujuannya semula.

Berikut pula pernyataan dari sekertaris dinas pariwisata mengenai pengendalian terhadap pengelolaan pantai samboang kabupaten bulukumba, menyatakan bahwa:

“ Terkait masalah pengawasan pantai samboang, kami telah memiliki tim khusus yang dibentuk pada akhir tahun 2000an yang memiliki tugas penting dalam mengawasi hal-hal yang menyangkut tentang pantai samboang yang ada di kecamatan bontotiro “( Hasil Wawancara AM, 05 Oktober 2017).

Berdasarkan wawancara langsung tersebut bahwa proses pengawasan sudah ada sejak dulu akan tetapi fakta dilapangan belum kami temui keberhasilannya karena kondisi yang ada di lapangan sangat memperhatikan seperti fasilitas dan infrastruktur yang tersedia . maka dari itu tim yang telah di bentuk agar dapat bekerja sesua dengan tugas dan fungsinya.

Pernyataan juga di perkuat dari hasil wawancara dengan kepala lingkungan desa ereelu barat mengenai pengendalian objek wisata pantai samboang, menyatakan bahwa:

“ Dalam proses ini kami mendapatkan perintah langsung dari pemerintah daerah dalam mengawasi langsung hal-hal yang berhubungan dengan objek wisata pantai samboang, kami sebagai masyarakat setempat sudah berusaha sekuat mungkin dalam mengawasinya akan tetapi banyak pihak

dari wisatawan lebih memilih memasuki pantai samboang dengan melewati jalan-jalan tertentu sehingga tidak di kenai biaya administrasi, maka dari itu kami akan lebih teliti lagi dalam mengawasi hal tersebut” (Hasil wawancara, R 15 oktober 2017)

Pernyataan yang sama juga peneliti dapatkan dari masyarakat yang mengunjungi objek wisata pantai samboang yang menjelaskan tentang pengendalian pantai samboang, menyatakan bahwa:

“ Kami sebagai pengunjung sudah melaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada pihak bersangkutan seperti cara masuk masyarakat yang secara ilegal agar pihak pengelola dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini”(Hasil wawancara dengan masyarakat, S 15 Oktober 2017)

Dari pernyataan wawancara diatas dapat bahwa dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan atau mengawasi pantai samboang di harapkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat di tanggulangi secara bersama sehingga terwujudnya suatu sistem yang lebih baik. Dengan adanya program kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah yang dibawah langsung oleh pemerintah daerah dapat menjalin kerjasam dengan masyarakat dalam mengawasi ,maka dari itu masyarakat diharapkan memiliki kesadaran penuh terhadap pengembangan objek wisata pantai samboang.

Masyarakat sebagai salah satu yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengelolaan yang di lakukan oleh pihak dinas pariwisata agar kiranya melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab apabila ada penyelewengan yang di lakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.

### 3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Menurut Mardiasmo (2016:18), kendala-kendala dalam melakukan pengelolaan adalah sebagai berikut;

#### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang tidak memadai merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan. Padahal wilayah kabupaten sangat luas dan masih banyak daerah yang jauh dari daerah pusat Kabupaten. Untuk menjangkau daerah tersebut inspektorat Kabupaten tidak memiliki sarana yang memadai seperti kendaraan yang dimiliki, sehingga untuk daerah yang jauh sangat sulit untuk dilakukan pengawasan. Akibat proses pengawasan menjadi tidak efektif dan efisien sehingga menghasilkan pengelolaan yang kurang maksimal.

Tabel sarana dan prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Penginapan	Kurang terawat
2.	Akses jalan	Kurang memadai
3.	Lahan Parkir	Tidak tersedia lahan parkir tetap
4.	Pedagang kaki lima	Tidak ada di dalam lokasi

Berikut ini pernyataan dari masyarakat sekitar pantai samboang terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pantai samboang di kabupaten bulukumba

“Kendala-kendala yang dihadapi saat kita masuk kawasan pantai adalah jarak, karena jarak antara loket pembayaran cukup jauh apabila ditempuh dengan berjalan kaki dan lahan parkir yang tersedia belum memadai serta tidak adanya penjual yang tersedia di kawasan pantai samboang, jikapun ada pasti jaraknya sangat jauh.( Hasil wawancara dengan masyarakat, H 15 oktober 2017)

Berdasarkan pernyataan dari pihak masyarakat terkait kendala-kendala yang dihadapi terhadap pengelolaan bahwa kendala yaitu jarak dan infrastruktur yang disediakan. Serta perbaikan sistem loket masuk ke pantai samboang harus diperbaiki

Berikut ini pernyataan dari kepala dinas pariwisata kabupaten bulukumba terhadap kendala-kendala dalam pengelolaan objek wisata pantai samboang di kabupaten bulukumba, menyatakan:

“Kendala utama yang kami dapatkan yaitu masalah pembebasan lahan karena dilahan tersebut merupakan milik masyarakat setempat jadi kita tidak bisa membangun di atas tanah milik masyarakat karena akan memicu protes dari masyarakat serta kesadaran masyarakat juga kurang akan pentingnya wisata pantai ,apabila pembebasan lahan ini terjadi maka akan menambah pemasukan daerah yang bersumber dari pantai tersebut, karena keindahan pantai samboang tidak kalah dengan pantai bira yang ada di kecamatan bontobahari, saya juga sadar jika pantai samboang bisa menyaingi pantai bira apabila rencana yang kami susun terlaksana sesuai dengan tujuannya”“( Hasil Wawancara AS, 05 Oktober 2017)

Pernyataan juga diperkuat dari hasil wawancara dengan kepala lingkungan desa ereelu barat mengenai kendala dalam pengelolaan pantai samboang di kecamatan bontotiro, kabupaten bulukumba, menyatakan bahwa:

“Pembebasan lahan memang sudah dilakukan pemerintah daerah ketika dipimpin oleh bupati Zainuddin, ketika itu mereka hanya menghargai tanah milik masyarakat hanya 20.000 saja sehingga masyarakat langsung menolaknya, serta infrastruktur yang tersedia sudah tidak memadai seperti loket pintu masuk sudah tidak terawat dan lahan parkir tidak ada, dan terdapatnya berbagai jalan alternatif untuk memasuki lokasi tersebut” (Hasil wawancara, R 15 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa kendala-kendala yang terdapat dalam pengelolaan Pantai Samboang yaitu mengenai sarana dan prasarannya seperti kesediaan infrastruktur di dalam lingkungan Pantai Samboang kurang memadai, dan perawatan loket pintu masuk ke kawasan wisata juga tidak memadai serta terdapatnya berbagai jalan alternatif untuk memasuki kawasan objek wisata sehingga dapat membuat pihak pengelola keliru dalam mendata seberapa banyak wisatawan yang datang berkunjung setiap tahunnya.

## 2. Kesadaran masyarakat yang rendah

Keindahan alam yang dimiliki Pantai Samboang sangatlah menarik dan mampu menjadi potensi wisata yang dapat menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Di butuhkan sistem pengelolaan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang merupakan modal utama pariwisata untuk menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Masyarakat sadar akan potensi wisata Pantai Samboang karena keindahan alamnya yang alami sehingga diharapkan banyak pengunjung yang datang berwisata bersama keluarganya karena sangat asyik untuk berekreasi bersama dengan keluarga dan handataulan terdekat sehingga mereka turut serta dalam menjaga kebersihan dan keindahan di sekitar objek wisata. Adapun wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat, mengatakan:

“kami bangga akan keindahan alam pantai samboang sehingga kami masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan objek wisataberusaha menjaga keamanan dan kebersihan serta kelestarian objek wisata pantai samboang, karena area sekitar pantai samboang banyak di tumbuh pepohonan yang rindang dan beberapa tempat duduk untuk wisatawan walaupun akhir-akhir ini sudah tidak terawat lagi, kami berharap pemerintah daerah sadar akan keindahan alam yang ada di sekitar pantai samboang dan dapat mengelolanya dengan benar karena pantai ini dapat berpotensi menjadi wisata bahari yang baik.” (Hasil wawan cara masyarakat, RS 15 oktober 2017)

Selain masyarakat sekitar objek wisata ,peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada kepala lingkungan ereelu barat,yang mengatakan:

“ semua pengelolaan objek wisata sudah ditangani oleh pemerintah daerah dan di bantu oleh masyarakat, contoh konkrit yang di lakukan pemerintah yaitu dengan di turunkannya satgas untuk membersihkan area sekitar wisata dan di bantu oleh sebagian besar masyarakat yang peduli kepada potensi objek wisata, beberapa bangunan juga telah di bangun masyarakat setempat guna untuk menjadi penginapan bagi wisatawan dari luar daerah yang datang berkunjung dan membutuhkan tempat penginapan, walaupun sudah ada beberapa penginapan yang telah dibangun oleh dinas pariwisata akan tetapi jarak antara penginapan ke pinggir pantai di nilai sangat jauh dan jalannya pun kurang memadai sehingga masyarakat setempat berinisiatif membangun penginapan sendiri guna menambah pemasukannya.(hasil wawancara, R 15 oktober 2017)

Partisipasi aktif masyarakat dalam membatu pemerintah daerah mengelola objek wisata pantai samboang di kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba memang seharusnya dilakukan agar kesadaran masyarakat akan pentingnya wisata pantai meningkat, karena pengelolaan tidak hanya di kelila oleh satu pihak tetapi membutuhkan kerjasam antara berbagai pihak. Upaya yang kecil yang di lakukan masyarakat dalam membantu pengelolaan yaitu dengan menjaga kebersihan pantai di sekitar objek wisata.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan yang dilakukan terfokus pada satu titik agar kiranya perencanaan yang dilakukan akan terlihat hasilnya. Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu dengan di rencanakan akan di bangun waterboom di kawasan pantai samboang. Perencanaan telah di buat pada tahun 2017 dan akan di laksanakan pada tahun 2018 dan selesai pada waktu yang telah ditentukan
2. Pengorganisasian Melibatkan semua elemen-elemen yang terkait dengan pengelolaan yang akan dilakukan sehingga pengelolaam tersebut dapat kita lakukan dengan membuahkan hasil yang diharapkan bersama. Menjalni kerjasama dengan media elektronik untuk mengenalkan pantai samboang ke masyarakat
3. Melakukan pelatihan-pelatihan baik pemandu wisata, pelaku wisata dan pengelola wisata. Koordinasi yang terus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan obyek wisata.
4. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pihak yang tak bertanggung jawab

5. Terkait dengan dimensi-dimensi pengelolaan yakni: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba termasuk ke dalam pengelolaan Sebagai perencanaan, karena kita dapat melihat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap objek wisata yang ada di desa Ereelu Barat dimana lokasi Pantai samboang berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikembangkan secara sadar dan sengaja.
6. Adapun kendala-kendala yang terdapat di lokasi yaitu masalah prasarana dan prasarana yang tidak mendukung atau sudah tidak terawat

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pengelolaan obyek wisata, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar sekiranya pengelolaan yang dilakukan terkait dengan obyek wisata pantai samboang dapat terealisasi secepatnya sehingga baik pemerintah, wisatawan dan terlebih lagi masyarakat setempat dapat merasakan manfaat yang besar dari pengembangan yang dilakukan tersebut.

Begitu pula dengan berbagai kawasan obyek wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba agar lebih dikembangkan lagi sehingga visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni Mewujudkan Kabupaten Bulukumba Sebagai Destinasi Wisata Unggulan di Sulawesi Selatan dapat terwujud dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affandi, Akhmad, 2015. Peranan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bulukumba, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol V, No 2 Oktober 2015. di Akses Pada Tanggal 09 juni 2017.Pukul07:30.  
[.http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query pengelolaan&authors.](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query=pengelolaan&authors)
- Amins, Achmad, 2013. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amira. 2016. *PengertianObjekWisata*,diAksespadatanggal 07 April.<http://www.atobasahona.com/2016/07/pengertian-objekwisata.html#ixzz4fc19BYd5>
- Antariksa. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Intrans Publishing. Malang.
- Darmawati. 2012. Pengelolaan Obyek Wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu pemerintahan*, Vol II, No 2. di Akses Pada Tanggal 06 juni 2017[http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query pengelolaan&authors.](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query=pengelolaan&authors)
- Draft, Richard L. 2002.*Manajemen*Edisi Kelima Jilid Satu, Erlangga. Jakarta.
- Fahril, 2014.Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Makassar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol IV, No 2. di Akses Pada Tanggal 6 juni-2017,[.http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query pengelolaan&authors.](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query=pengelolaan&authors)
- Faisah Nur, 2015. Good Environmental Governance ( Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar ), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol V, No 2. Di Akses Pada Tanggal 6 Juni 2017.  
[http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query pengelolaan&authors.](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query=pengelolaan&authors)
- Handoko T. Hani. 2000. *ManajemenPersonaliadanSumberdayaManusia*.Edisi II CetakanKeempatBelas.BPFE. Yogyakarta

- Harnida, dkk, 2012, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Hutan Batu Rammang-Rammang Di Kabupaten Maros, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. II, No 2. di Akses Pada Tanggal 06 juni 2017. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query=pengelolaan&authors>
- Herman, K. 2015. Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol V, No 2. di Akses Pada Tanggal 09 juni 2017. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/>
- Madani, Muhlis DKK. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan skripsi*. Makassar
- Masruri. 2014. Analisis efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan(PNPM-MP) ( studi kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). *Governance and public policy*, Vol. 1 (1): 53-76
- Nanang, Fattah.2014.*KonsepManajemenBerbasisSekolah (MBS) danDewanSekolah*. Bandung: Baniquraisy.
- Pranadjaja, M.R. 2015.***Hubunganantarainstansipemerintah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardjo,Adisasmita.2014. *PengelolaanPendapatandanAnggaran Daerah*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Ruslan. 2010. *Skripsi Pengelolaan Barang Inventaris di Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar*. Program studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makassar
- Seftyono, Cahyo 2016. kepemimpinan desa dan pengelolaan sumber daya alam aras lokal di tiga lereng desa gunung ungaran, jawa tengah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol IV, No 2, di akses pada Tanggal 06 juni 2017. Copyright © 2016, Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320
- Soebagyo, 2012.Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia,*Jurnal Liquidity*.Jakarta Selatan, Vol 1, No 2 di akses Tanggal 25 Mei 2017.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta
- Syafiie, I.K. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Teguh, Frans.2015. *Tata Kelola Destinasi*, GadjhaMada. yogyakarta: University Press.

Widyasmi. 2013 *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. di akses Tanggal 06 Juni 2017. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/biosaintifika>

### **Peraturan**

SK Menparpostel No.KM 98 PW. 102 MPPT –87 tentang Objek wisata

Undang-UndangNo.10/2009 TentangKepariwisataan

Undang-Undang No.10/ 2009 tentangKepariwisataan, pada Bab I pasal I mengenai ketentuan umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
07/Pmk.02/2006 Tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan  
Dan  
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan  
Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor: 6 Tahun 2009 Tentang Rencana  
Induk Pengembangan Kepariwisataan daerah (RIPPDA) Kabupaten  
Bulukumba

## RIWAYAT HIDUP



**A.Muh.Nurfara Aidid**, lahir pada tanggal 10 januari 1994 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak A.Makkulau dan ibunda A.Sudarsih.

Penulis memulai pendidikan dasar di SDN 26 Matekko kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba pada tahun 2000 dan tammat pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gangking Kabupaten Bulukuma provinsi Sulawesi selatan dan tammat pada tahun 2009.. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bulukumba dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada program strata satu (S1) program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berkat perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul:

“Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”